



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL MULTIDISIPLIN ILMU (SENMI) 2011
UNIVERSITAS BUDI LUHUR JAKARTA
ISSN: 2087-0930

Pemanfaatan IPTEK dalam Pemberdayaan Publik untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Pelestarian Lingkungan Hijau Menuju Ketahanan Nasional

7 Oktober 2011

UNIVERSITAS & AKADEMI SEKRETARI BUDI LUHUR

Jl. Cileduk Raya, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12260

Telepon (021) 5853753 ext. 253/257/216

Email : senmi@budiluhur.ac.id
Website <http://senmi.budiluhur.ac.id>

ISSN 2087-0930



9 772087 093077

PANITIA PELAKSANA

Susunan Panitia Pelaksana SENMI BL 2011

Dr. Nazori AZ, MT
Dr. Denik Iswardani W. M.Si
Prof M. Suparmoko, M.A, PhD
Dr. Drs Hadiono Afdjani, M.Si, MM

TIM REVIEWER

: Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara
: Dr. Ir Nazori AZ MT
: Ir. Ratnaningsih AW, MBA
Arief Wibowo, M.Kom
Ir. Yan Everhard, MT
: Mia Laksmiwati, SE, MM
: Sujono, MT
: Dwi Achadiani, M.Kom
: Brury Tria Sartana, M.Kom
: Bambang Pujiono, S.Sos, MM, M.Si
: Suhono, SE
: Widodo MS, S.Kom
: Martini, SE
: Reni Hariyani, SE, M.Akt
: 1. Windarto, M.Kom
2. Sugeng Priyanto, SE
3. Dewi Kusumaningsih, M.Kom
: Gandung Triyono, M.Kom
: Rizky Tahara Shita, M.Kom
: 1. Yudi Santoso, M.Kom
2. Irawan, M.Kom
: Purwadi
: Muhamad Ikhsan, SE
: Titi Hastuti
: Rini Lestari, S.Sos

No	Nama	Judul Makalah	Hal
9	Siti Purnami Sunardiyaningsih, Maulana Darmajati	ANALISIS TREND UNTUK MEMPREDIKSI ZAKAT FITRAH DAN FIDYAH, SUATU UPAYA UNTUK MELAYANI MUSTAHIK DENGAN TERHORMAT. STUDI KASUS PADA MASJID IMAM BUNJOL, JAKARTA, TAHUN 1422H/2001M - 1430H/2009M.	397
10	Budi Rahardjo, Tunjung Sulaksana	TINGKAT KOMPETISI ALUMINUS PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BUDI LUHUR	406
11	Sugeng Riyadi	ANALISIS INVESTASI DENGAN PENDEKATAN BIAYA PENUH, PENGELOLAAN DAN PENGEMBALIAN INVESTASI USAHA RUMAH KONTRAKAN	417
12	Muhammad Nuur Farid Thoha, S.E., M.Si dan Munir, S.Kom	BIMBINGAN BELAJAR CHIPS (CHEAP, HIGH QUALITY, PROPER AND SIMPLE) DENGAN PENDEKATAN IPTEK DAN IMTAK (PEMBERDAYAAN MAHASISWA SEBAGAI PENGAJAR, DENGAN PRIORITAS SISWA KURANG MAMPU)	425
13	Kartini Istiqomah, Sri Rahayu, Wahyuni Ekawati	ANALISIS NILAI EKONOMI SAMPAH PADA TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI EMPIRIK PADA SUKU DINAS KEBERSIHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN)	432
14	Puspita Rani, SE, M.Ak, Reni Hariyani, SE, M.Ak	AKUNTANSI LINGKUNGAN : SEBUAH KOMPONEN PENTING DALAM STRATEGI BISNIS PERUSAHAAN	438
15	Mia Laksmiwati SE, MM	PENGARUH CAR.LDR.BPOQ,INFLASI,BI RATE DAN KURS USD TERHADAP IDR TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE JANUARI 2008 – JUNI 2011	447

No	Nama	Judul Makalah	Hal
1	Liza Dwi Ratna Dewi	PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KASUS RUYATI PADA BEBERAPA SURAT KABAR)	455
2	Yan Kurniawan, M.Si	PERAN STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK STUDI KASUS : FENOMENA DIALOG PEMDA – MASYARAKAT LOKAL PASCA BENTROKAN DI TAMBANG EMAS DI PARADO, BIMA, NTB, 2011	461
3	Dr. Hadiono, MM, M.Si.	PENCITRAAN DIRI DI MEDIA SOSIAL "FACEBOOK" (STUDI DRAMATURGI PENGGUNA FACEBOOK DI JAKARTA)	465
4	Nawiroh Vera	"JAGONGAN" SEBAGAI BENTUK KOMUNIKASI SOSIAL PADA MASYARAKAT SOLO DAN MANFAATNYA BAGI PEMBANGUNAN DAERAH	472
5	Armaini Lubis, Shinta Kristanty	OPINI PUBLIK MENGENAI PELAYANAN PENDIDIKAN (STUDI KUANTITATIF DESKRIPITIF PADA KEPUASAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI, UNIVERSITAS BUDI LUHUR, JAKARTA)	478
6	Ummamah Wahid	ALIANSI JARINGAN, OTONOMI DAERAH DAN KOMUNIKASI POLITIK PEREMPUN ANGOTA DPRD PROVINSI JAWA BARAT DAN BANTEN PERIODE 2009-2014 *	484
7	Denik Iswardani W, Elistania	KRISIS PANGAN GLOBAL: ANALISIS KEAMANAN PANGAN (FOOD SECURITY) STUDI KASUS: INDONESIA	496
8	Bambang Pujiyono, M.Si	PENGEMBANGAN PELAYANAN PUBLIK DI TINGKAT KELURAHAN DAN KECAMATAN STUDI PADA KOTA TANGERANG	501
9	Rusdiyanta, SIP, SE, M.Si	ASPEK KELEMBAGAAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA: STUDI KASUS KALIMANTAN BARAT-SERAWAK	505

No	Nama	Judul Makalah	Hal
1	Anggun Dyah S. Sri Kurniasih, Tri Endangsih	PEMODELAN LAMPU JALAN LED DENGAN MENGGUNAKAN PHOTOVOLTAIC PADA JL. SATRIA SUDIRMAN KOTA TANGERANG	512
2	Hakim, M Pd., Tri Endangsih, M.Ars	"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT DALAM MEMILIH RUSUNAWA SEBAGAI TEMPAT TINGGAL" (STUDI KASUS: RUSUNAWA COKRODIRJAN DAN GEMAWANG DI KABUPATEN SLEMAN, PROPINSI DI YOGYAKARTA)	521
3	Ir. Budi Fadhyah, MTA, Dr. Ir. Kusnaimur, MT	SINERGITAS PENGEMBANGAN TAMAN WISATA RAKYAT DENGAN KONSERVASI SUMBER AIR GEMULO, DESA BULUKERTO, KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU, JAWA TIMUR	529
4	Euce Ramli Alrashid	MEMPERBAIKI KUALITAS DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP IBUKOTA JAKARTA DENGAN PROGRAM TAMAN ASUH	540
5	Puthi Suryandari, ST, M.Ars	KAJIAN BENTUK, RUANG DAN TATANAN ARSITEKTUR GENDER DALAM RUANG KOTA	550
6	Sri Kurniasih	PENGARUH PENGGUNAAN KOMBINASI SKYLIGHT DAN VENTILASI ATAP TERHADAP KENYAMANAN PADA PENGEMBANGAN RUMAH SEDERHANA TANPA BUKAAN SAMPING STUDI KASUS : PERUMAHAN PAMULANG PERMAI II TIPE 21 DI TANGERANG	559

KRISIS PANGAN GLOBAL: ANALISIS KEAMANAN PANGAN (FOOD SECURITY) STUDI KASUS: INDONESIA

Denik Iswardani W.,
Elistania

denik.iswardani@budiuhur.ac.id

Abstrak

Dunia saat ini tengah berada pada masa krisis pangan global. Salah satu indikator terjadinya krisis pangan seperti yang terserap oleh Food and Agriculture Organization (FAO) adalah tingginya kenaikan harga pangan yang terus menerus mengalami kenaikan signifikan. Tulisan berikut mengkaji persoalan krisis pangan global dengan menggunakan analisa ketahanan pangan (food security). Untuk lebih memperdalam pemahaman yang lebih mendalam, kajian ini mengambil studi kasus yang terjadi di Indonesia. Kajian ini menjelaskan beberapa hal, antara lain faktor-faktor penyebab terjadinya krisis pangan, bagaimana krisis pangan dapat menjadi ancaman keamanan, dan secara khusus menjelaskan upaya Indonesia dalam menangani masalah krisis pangan ini. Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan data sekunder kajian ini menyimpulkan bahwa sistem ekonomi dunia sangat mempengaruhi terjadinya krisis pangan dunia. Pada akhirnya, krisis pangan yang terjadi secara beraturan dapat mengancam keamanan suatu negara.

Kata kunci: krisis pangan, food security, ancaman non-konvensional.

1. PENDAHULUAN

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling penting dan merupakan indikator utama kesejahteraan manusia. UNDP menyatakan keamanan pangan tidak saja meliputi kecukupan akan suplai makanan, tetapi juga berarti bahwa semua orang setiap saat harus memiliki akses fisik, secara fisik maupun ekonomi ke atas pangan. Ini membutuhkan tidak saja ada makanan yang cukup di sekitar kita, tetapi juga memerlukan keadaan dimana orang mempunyai akses yang siap terhadap pangan (UNDP 1994: 22).

Ada dua indikator yang bisa digunakan untuk keamanan pangan ini yaitu: pertama, ketersediaan pangan yang diukur dari harian per kapita. Kedua, angka kelaparan anak yang diukur dari persentase anak di bawah 5 tahun yang kurang gizi (Jenkins & Scanlan, 2001). Di Indonesia saat ini 17,9% anak balita (atau sekitar 5 juta jiwa) mengalami masalah gizi akibat mahalanya harga pangan. Angka ini kebanyakan wilayah pedesaan. (Riset Kesehatan Dasar, 2010). Ini menjadi salah satu indikator bahwa keamanan pangan Indonesia rawan terhadap krisis pangan.

Tulisan berikut membahas fenomena krisis pangan global dengan mengumpulkan kajian pada kasus yang terjadi di Indonesia. Kerawanan pangan yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya hubungan krisis pangan global dengan krisis-krisis yang terjadi di negara-negara berkembang. Tulisan ini mengulas faktor-faktor yang menyebabkan krisis pangan tersebut. Berikutnya juga dijelaskan bagaimana krisis pangan tersebut pada akhirnya dapat menjadi ancaman bagi keamanan individu maupun masyarakat.

2. PEMBAHASAN

Dekade ini, harga berbagai kebutuhan pokok mulai dari pangan hingga bahan bakar mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Harga tersebut bahkan sudah melampaui harga-harga yang pernah berlaku sebelumnya. Kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut tampaknya menjadi pertanyaan dan

peringatan awal akan terjadinya krisis global terutama dalam hal pangan. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), tingkat kenaikan harga pangan yang terus menerus mengalami kenaikan signifikan merupakan salah indikator terjadinya krisis pangan. Laporan FAO yang berjudul "Growing Demand on Agriculture and Rising Prices of Commodities" menunjukkan indeks harga pangan meningkat rata-rata 9 persen pada tahun 2006. Harga ini meningkat jauh lebih tinggi keimbang tahun-tahun sebelumnya. Bahkan pada tahun 2007 indeks harga pangan meningkat 23 persen dibandingkan dengan tahun 2006. Hingga caturwulan pertama 2008, indeks harga pangan telah meningkat pada level 97 persen. Pada awal tahun 2011, harga pangan dunia kembali meningkat ke level tertinggi di atas 2008. Indeks harga pangan global Februari mencapai 236 poin atau naik 2,2 persen dibanding Januari sebesar 231 poin (www.fao.org, 5 September 2011).

Beberapa pertemuan dunia telah diadakan untuk mengatasi masalah krisis pangan mulai dari KTT Washington yang dipelopori oleh Negara-Negara G7, dan lembaga-lembaga multilateral dunia, KTT Pangan Amerika Latin, hingga KTT Pangan yang berlangsung di Roma. Hasil pertemuan menyimpulkan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan krisis pangan saat ini terjadi. Pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk, efek pemanasan global akibat kerusakan lingkungan alam, krisis energi dan penggunaan bahan pangan sebagai pengganti bahan bakar fosil dituding sebagai penyebab krisis yang terjadi. Seangkan menurut FAO, secara umum kenaikan harga pangan dunia juga terimbas harga minyak yang terus menguat serta kondisi cuaca buruk di negara-negara seperti China dan Rusia serta munculnya spekulasi di pasar komoditas (<http://id.ihimes.com/articles/3906/20110105/pbb-harga-pangan-global-meningkat.htm> diakses 7 Agustus 2011).

Krisis pangan global juga terjadi karena sistem ekonomi dunia yang sangat neoliberalis yang membebaskan perusahaan multinasional mengejar keuntungan. Privatisasi dan eksploitasi terus dilakukan tanpa memikirkan konsekuensi lingkungan yang dapat timbul karenanya. Akibatnya suhu menjadi tidak menentu dan kualitas tanah serta penyerapan air di negara berkembang menjadi rusak. Hal itulah yang pada akhirnya menjadi penyebab kegagalan panen. Sedangkan negara berkembang adalah penghasil bahan pangan terbesar di dunia (Marcella, 2007).

Ada 36 negara di dunia yang tengah dilanda krisis pangan yaitu Lesotho, Somalia, Swaziland, Zimbabwe, Eritrea, Liberia, Mauritania, Sierra Leone, Burundi, Republik Afrika Tengah, Chad, Congo, Côte d'Ivoire, Kongo, Ethiopia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Sudan, Uganda, Irak, Afghanistan, Korea Utara, Bangladesh, Indonesia, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, dan Timor-Leste, Bolivia, Haiti, Nikaragua, Republik Dominika, Republik Moldova dan Federasi Rusia (*Global Information and Early Warning System* FAO, 2008).

Memang kondisi Indonesia tidak separah negara-negara di kawasan Afrika, tetapi krisis pangan tersebut sudah menjadi suatu kerawanan dan ancaman. Mencukupi kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang berdasarkan sensus tahun 2010 mencapai 237.556.363 orang (www.bps.go.id/diakses 12 Agustus 2011), bukan merupakan hal yang mudah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingginya harga bahan pangan di Indonesia sekarang ini. Pada awal tahun 2011 harga kebutuhan pokok terutama beras naik 12,36 persen dan tepung terigu naik 0,36 persen (<http://metrotvnews.com/read/analisa/2011/02/05/134/Perubahan-iklim-dan-Ancaman-Krisis-Pangan-Dunia-diakses> 23 Juli 2011).

Rata-rata per-tahun, Indonesia mengeluarkan Rp. 110 triliun untuk impor pangan, sementara nilai pembiayaan pertanian dalam APBN hanya Rp. 38,2 triliun. Ketergantungan impor terus menerus akan mempengaruhi penurunan produksi pangan dalam negeri (<http://www.csforum.net/multimedia/bahan-bacaan/435-110-triliun-rupiah-untuk-impor-pangan-vs-382-triliun-pembayaan-pertanian.html> diakses 1 September 2011). Direktur Riset Institute for Development of Economics of Finance (Indef), Evi Noor Afifah menyatakan bahwa ketergantungan Indonesia yang besar terhadap impor sejumlah komoditas pangan utama menyebabkan Indonesia terancam menghadapi krisis pangan. Ketergantungan impor terus-menerus akan mempengaruhi penurunan produksi pangan dalam negeri, dan ini akan menjadi sangat berbahaya karena kita tidak bisa mengontrol jika terjadi gejolak harga atau penurunan produksi di pasar internasional

(<http://www.vonnews.com/indonesian/news/Indonesia-Terancam-Krisis-Pangan-117202983.html>) diakses pada 2 September 2011)

Faktor penyebab lainnya adalah pilihan kebijakan pangan dan pertanian yang salah. Pemerintah telah memilih mengembangkan perkebunan dibandingkan tanaman pangan, sehingga Indonesia mengalami defisit perdagangan pangan dan peternakan 4,3 miliar US\$ (Kementan dan BPS, 2009).

Selain itu, faktor perubahan iklim juga menjadi salah satu pemicu peningkatan spekulasi pangan beberapa tahun terakhir. Akibat kondisi iklim yang tidak stabil berpengaruh pada produksi pangan walaupun hingga hari ini produksi pangan dunia sesungguhnya masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan populasi dunia, namun produksi ini tidak merata. Di satu sisi sejumlah daerah memiliki penurunan produksi, di sisi lain sejumlah daerah juga mengalami peningkatan produksi seperti misalnya sawah tadah hujan yang bisa tahan 2-3 kali akibat peningkatan cuaca hujan. Ketidakstabilan dan tidak meratanya produksi pangan, menjadi ajang spekulasi yang menguntungkan bagi para pemilik modal. Misalnya kasus lonjakan harga beras hingga 30%, harga cabe naik hingga 120% di awal tahun ini karena terjadi sedikit penurunan produksi sementara di tingkat petani harganya relatif tetap (<http://www.vonnews.com/indonesian/news/Indonesia-Terancam-Krisis-Pangan-117202983.html>) diakses 1 September 2011).

Untuk mengatasi krisis pangan yang mengancam, pemerintah mulai mengembangkan kebijakan yang berkenaan dengan ketahanan pangan. Di Indonesia, secara formal dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, istilah kebijakan dan program ketahanan pangan diadopsi sejak tahun 1992 (Repelita VI) yang definisi formalnya dicantumkan dalam undang-undang pangan tahun 1996. Dalam pasal 1 undang-undang pangan tahun 1996, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang terdapat dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, secara fisik dan terjangkau (<http://www.theceli.com/dokumen/produk/1996/uu-1996.htm>) diakses 1 September 2011).

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem. Subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut. Subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan yang telah dikelola secara bijaksana. Subsistem distribusi pangan mencakup aspek aksesibilitas secara fisik dan ekonomi atas pangan secara merata, yang harus dikelola secara optimal dan tidak bertentangan dengan mekanisme pasar terbuka agar tercapai efisiensi. Subsistem konsumsi pangan menyangkut upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, gizi dan kesehatan yang baik, sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal (Maleha & Sutanto, 2006: 196).

Dari segi kelembagaan, ketahanan pangan tercapai melalui sinergi antara subsistem individu atau keluarga, subsistem masyarakat, dan subsistem pemerintah. Mekanisme subsistem ini dihubungkan dengan berbagai aspek pembangunan lain seperti pertanian, transportasi, teknologi, sumberdaya alam dan lingkungan, perdagangan, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, ketahanan pangan bukan hanya sekedar pemenuhan produksi makanan, tetapi merupakan persoalan yang lebih kompleks, yang memiliki perspektif pembangunan dan ekonomi politik.

Saat ini, kebijakan pemerintah Indonesia masih kurang efektif untuk menghadapi ancaman krisis pangan. Elisha Karlini, staf departemen kajian strategis Serikat Petani Indonesia dalam wawancara menyatakan bahwa kondisi kekuatan dan ketahanan pangan di Indonesia saat ini sedang berada pada titik dimana jika tidak segera dilakukan perbaikan dapat menyebabkan ketegangan bahkan kerawanan pangan. Dari sisi produsen pangan utama, petani dalam hal ini, jumlahnya masih sangat dominan di Indonesia. Berdasarkan sensus pertanian masih terdapat 25 juta rumah tangga petani, dengan rata-rata pertanaman 2,2% per tahun, bahkan 46% tenaga kerja masih bekerja di sektor pertanian, suatu jumlah yang sangat besar. Namun di sisi sumber daya pertanian seperti, tanah, air, benih, dan dukungan infrastruktur dan kebijakan pertanian justru menghambat produksi pertanian nasional. Alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan monokultur (sawit khususnya), tambang dan infrastruktur sebesar 230.000 hektar per tahun akan mempengaruhi penurunan produksi pangan dengan cepat, pengusiran sumber daya air oleh

perusahaan swasta seperti di Sukabumi, Jawa Tengah dan beberapa daerah lain serta kondisi irigasi yang buruk juga mempengaruhi produksi dan produktifitas tanaman pangan. Di sisi lain kebijakan pertanian justru membuka pintu impor pangan besar-besaran. Hal ini menurunkan insentif bagi petani untuk terus berproduksi, seperti contohnya pada petani kedelai yang sempat mengalami swasembada pada awal tahun 1990an namun mendapat gempuran kedelai impor murah membuat mereka kalah bersaing sehingga saat ini Indonesia harus mengimpor 70% kebutuhan kedelainya (<http://www.esoforum.net/multimedia/bahan-bacaan/435-110-triliun-rupiah-untuk-impor-pangan-vs-382-triliun-pembiayaan-pertanian.html>) diakses 1 September 2011).

Untuk itu, Indef mendesak pemerintah segera melakukan upaya peningkatan produktivitas dan produksi pangan Indonesia agar Indonesia kedepan terhindar dari ancaman krisis pangan. Evi Noor Afifah, menegaskan bahwa Indonesia perlu upaya sistematis untuk mencapai swasembada pangan, kemudian harus ada stok penyangga ketahanan pangan yang memadai dengan mengutamakan penyerapan dari dalam negeri. Jadi dengan adanya stok penyangga ketahanan pangan ini diharapkan harga pangan ini tidak menjadi fluktuatif sedangkan pengamat Ekonomi dari Institute Pertanian Bogor, Drajad Wibowo mengungkapkan sebagai negara agraris, Indonesia seharusnya mampu berswasembada beras maupun komoditas lainnya (<http://www.vonnews.com/indonesian/news/Indonesia-Terancam-Krisis-Pangan-117202983.html>) diakses 1 September 2011).

Mengenai hal tersebut, Menteri Pertanian Suswono menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk tidak melakukan impor sejumlah komoditas pangan. Pemerintah, juga sangat memperhatikan nasib petani. Pemerintah saat ini juga telah menyediakan dana sebesar dua triliun rupiah untuk petani yang merugi akibat perubahan cuaca ekstrim. Kementerian Pertanian telah menetapkan target produksi beras tahun 2011 sebesar 70,6 juta ton guna mengatasi krisis pangan di Indonesia (<http://sumut.litbang.deptan.go.id>) diakses pada 8 Agustus 2011).

Memang sektor pertanian mempunyai peranan penting untuk memperbaiki krisis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Ilmu-ilmu Pertanian Indonesia menyimpulkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian memberikan kontribusi yang paling besar dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, yaitu mencapai 66%, dengan rincian 74% di perdesaan dan 55% di perkotaan. Berdasarkan data kemiskinan tahun 2005-2008, kesejahteraan penduduk perdesaan dan perkotaan memang secara berkelanjutan (<http://www.lisa-pusat.org/artikel/strategi-dan-pencapaian-swaseembada-pangan-di-indonesia.html>) diakses pada 8 Agustus 2011).

Selain hal di atas, pemerintah juga perlu menggalakan upaya diversifikasi makanan. Diversifikasi pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Diversifikasi konsumsi pangan tidak hanya sebagai upaya mengurangi ketegangan pada beras tetapi juga upaya peningkatan perbaikan gizi untuk mendapatkan manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing dalam percaturan globalisasi (Himagi, 2009).

Keseragaman jenis makanan yang tidak sesuai dengan faktor budaya suatu wilayah dapat menyebabkan krisis makanan. Pakar Gizi Universitas Indonesia, Arum Amawikarta berpendapat bahwa seharusnya orang asli yang memakan ubi justru ditinggalkan. Kelaparan atau krisis pangan terjadi kadang bukan karena penggantian makanan, tapi mereka tidak sesuai makanannya. Begitu juga dengan di Ambon, dengan satu kali menanam sagu, bisa sampai enam bulan untuk satu keluarga. Oleh karena itu pemerintah harus menyesuaikan, dan tidak dapat menyamarakatakan (<http://berita.liputan6.com/read/322201/tingkatkan-gizi-pemerintah-harus-perhatikan-budaya>) diakses 19 Agustus 2011).

3. PENUTUP

Sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Jika salah satu tak terpenuhi, pastilah hal tersebut dapat mengancam keamanan bagi kehidupan individual manusia itu sendiri, dan tentu dapat memicu konflik bagi masyarakat. Berdasarkan data dan analisa di atas, terlihat adanya hubungan antara krisis pangan dan kesejahteraan dalam menjamin keamanan pangan. Krisis pangan yang terjadi di beberapa wilayah telah mengancam hak individu maupun masyarakat untuk mendapatkan pangan.

PENGEMBANGAN PELAYANAN PUBLIK DI TINGKAT KELURAHAN DAN KECAMATAN STUDI PADA KOTA TANGERANG

Bambang Pujiyono, M.Si¹, Ade Sukron M.Si²

^{1,2} Universitas Budi Luhur, Jakarta
e-mail : ¹ Bambang.pujiyono@budiluhur.ac.id

Abstrak

Penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dianggap sebagai salah satu kunci menuju tata pemerintahan yang baik (good governance). Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat dilakukan karena sudah merupakan tugas, tanggungjawab dan fungsi pemerintah sebagai pemberi pelayanan (public servant). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kondisi faktual pelayanan, dengan adanya gambaran kondisi faktual tersebut kemudian dapat dirumuskan model pelayanan yang sesuai dengan konsep pelayanan prima untuk diterapkan di Kota Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini metode wawancara, dan studi dokumen. Berdasarkan hasil analisis data Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Prima di Kelurahan dan Kecamatan Kota Tangerang didapatkan dari sisi kondisi faktual pelayanan bahwa jenis pelayanan masih terbatas hanya pada pelayanan administrative dan kemasyarakatan, belum menyentuh pada pelayanan pembangunan dan utilitas. pelayanan juga belum dapat maksimal karena belum adanya dukungan kebijakan yang mengatur tentang pelayanan public di Kota Tangerang.

Kata Kunci:
Pelayanan Publik, Kelurahan, Kecamatan.

1. PENDAHULUAN

Salah satu perubahan mendasar sejak diimplementasikan Undang-Undang Otonomi Daerah berupa pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sebagaimana dikemukakan (Hoessein, 2001:5) :

“Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi dapat pula disebut otonomisasi, otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau pemerintah daerah”.

Dalam era otonomi daerah, tuntutan peranan pemerintah daerah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan menyediakan *public services* yang dibutuhkan. Pemenuhan kebutuhan publik tersebut tidak sepenuhnya dapat dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah harus membuka dan memberi kesempatan kepada institusi di luar pemerintah untuk ambil bagian dalam memberikan dan melayani kepentingan publik.

Kecamatan dan Kelurahan merupakan satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara dan bersentuhan langsung ke masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan suatu daerah tergantung dari sejauh mana aparat pemerintahan kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut dan pelibatan masyarakat

Kemampuan tidak akan pernah tercapai apabila kesejahteraan rakyat tidak terjamin. Untuk itu, upaya untuk menjaga keamanan pangan juga berarti harus menjaga kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerantasan kemiskinan. Kedua-duanya mesti berada dalam keadaan yang sama kuat.

RUJUKAN

- [1] *Global Information and Early Warning System* FAO. 2008. *Negara-Negara Yang Terkena Krisis Pangan*. <http://www.detikfinance.com/read/2008/03/02/122419/902557/4/36-negara-terkena-krisis-pangan-termasuk-indonesia>
- [2] Himagizi. 2009. *Diversifikasi Pangan*. <http://gizi.fema.ipb.ac.id/himagizi/?p=83>
- [3] Jenkins, J.C & Stephen J. Scanlan. 2001. Food Security in Less Developed Countries, 1970 to 1990 *American Sociological Review*, 66(5): 718-744.
- [4] Purnama, Adi & Nur'aripin. 2010. Diversifikasi Pangan Untuk Mengatasi Krisis Pangan Di Indonesia <http://www.ipb.ac.id/lombaartikel/pendaftaran/uploads/ipb/pertanian-dan-pangan/Diversifikasi.pdf>
- [5] Republik Indonesia. 2002. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2000 Tentang Ketahanan Pangan*. Jakarta: Sekretaris Negara RI.
- [6] Tjondronegoro, Sediono M.P. 2006. Swasembada Pangan Berkelanjutan : Apakah Realistis ? <http://www.komunitasdemokrasi.or.id/article/swasembada.pdf>
- [7] www.fao.org
- [8] <http://id.ihimes.com/articles/3906/20110105/pbb-harga-pangan-global-meningkat.htm>
- [9] www.bps.go.id
- [9] <http://metronews.com/read/analisdetail/2011/02/05/134/Perubahan-Iklin-dan-Ancaman-Krisis-Pangan-Dunia>
- [10] <http://www.soforum.net/multimedia/bahan-bacaan/435-110-triliun-rupiah-untuk-impor-pangan-382-triliun-pembiayaan-pertanian.html>
- [11] <http://www.voanews.com/indonesian/news/Indonesia-Terancam-Krisis-Pangan-117202983.html>
- [12] <http://www.theceli.com/dokumen/produk/1996/uu7-1996.htm>
- [13] <http://berita.liputan6.com/read/322201/tingkatkan-gizi-pemerintah-harus-perhatikan-budaya>
- [14] <http://www.iiasa-pusat.org/artikel/strategi-dan-pencapaian-swasembada-pangan-di-indonesia.html>
- [15] <http://sumut.litbang.deptan.go.id>